



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025 yang merupakan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, dan RPD dan Renstra 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan bulan Mei 2025 atau di TW I, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua

pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Juni 2025
Kepala Dinas Perhubungan,



Drs. FX. Toni Sri Buntoro, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DARTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1. Maksud.....	6
1.3.2. Tujuan.....	7
1.4.Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I.....	9
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I.....	9
2.2.Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Sampai Dengan Triwulan I.....	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1.Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	19
3.2.Matrik Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.....	23
3.3.1. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana.....	23
3.3.2. Prioritas Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan.....	24
3.3.3. Target Kinerja.....	25
BAB IV PENUTUP.....	46

DARTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s/d Tahun 2025 Triwulan I	18
Tabel 3.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025	19
Tabel 3.2 Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025	26
Tabel 3.3 Perubahan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025.....	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan arah kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD dan Renja merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut di atas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

Secara umum Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 memuat kebijakan pembangunan transportasi, yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Sukoharjo dimana secara substansi diawali dengan kondisi umum yang menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 secara singkat, serta masalah dan tantangan termasuk isu-isu strategis sektor transportasi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. I) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 6);
- n. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 44);

- o. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I
 - 2.2. Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Sampai Dengan Triwulan I
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
 - 3.2. Matrik Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan pada Tahun Anggaran 2025 Sampai Dengan Triwulan I telah melaksanakan 3 program, 19 kegiatan dan 44 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian sebesar 10% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian 0%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian 20%.
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capain sebesar 10,29% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian 6,29%.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, capaian 14,29%.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, capaian 0%.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capain sebesar 0% dengan rincian :
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian sebesar 0%
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capain sebesar 21,47% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian 10%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 16,67%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, capaian 0%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian 23,68%.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian 50%.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, capaian 50%
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian 0%.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 13,33% dengan rincian capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, capaian 13,33%.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capain sebesar 22,91% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian 25%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian 25%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 16,67%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25%.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capain sebesar 37,16% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian 71,05%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian sebesar 25%.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, capaian 15%.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:
- 2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota capain sebesar 0% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian 0%.

- 2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 18,45% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 0%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian 23,93%.
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, capaian 24,85%.
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, capaian 25,03%.
- 2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal, capain sebesar 0% dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang, capaian 0%.
 - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), capaian sebesar 0%.
- 2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, capain sebesar 0% dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 0%.
- 2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capain sebesar 12,5% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian sebesar 0%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 0%.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 0%.
 - d. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 50%.
- 2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capain sebesar 8,335% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capaian sebesar 0%.
 - b. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, capaian 16,67%.
- 2.7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 25% dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin capaian sebesar 25%.
- 2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, capaian sebesar 25%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, capaian 25%.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 25%.
- 2.9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 10%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian 0%.
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, capaian 20%.
- 2.10 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota capain sebesar 0% dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 0%

- 2.11 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 22,5%, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, capaian 20 %.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian 25%.
3. Program Pengelolaan Perkotaan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:dengan rincian capaian
- 3.1 Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 0% dengan capaian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota capaian sebesar 0%

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja sub kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa 44 sub kegiatan Dinas Perhubungan

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I rata-rata capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 15,62%. Disisi lain, secara umum pelaksanaan sub kegiatan yang menjadi penunjang utama pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 telah dapat direalisasikan dengan baik dengan pencapaian rata-rata kinerja output sub kegiatan mencapai prosentase 15,62 %. Hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I dapat tercapai 13,19%. Bila dibandingkan dengan target Triwulan I 25%, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2025 sampai dengan semester I mengalami masih kurang 11,81%.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I belum dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 11,81% guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026. Dalam hal pencapaian target kinerja sub kegiatan atau output sub kegiatan dapat terealisasi secara maksimal dengan presentase 15,62%. Hal ini menunjukkan masih perlu adanya peningkatan kinerja sub kegiatan dan kinerja keuangan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

2.2. Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Sampai Dengan Triwulan I

Pada Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah Yang Baik” mencapai target 145,95%. Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya kinerja sarana transportasi” 200%, Sasaran “Meningkatnya kinerja prasarana transportasi 78,94%, sedangkan sasaran “Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public” hanya mencapai 0%. Capaian tersebut dapat tergambar pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s/d Tahun 2025 Triwulan I

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2024	2025		Persentase Capaian s/d Triwulan I	Status Capaian RPJMD	Pendukung	Penghambat
						Target	Realisasi s/d Triwulan I				
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah Yang Baik	Rasio Angka Efektifitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Rasio	0,290	0,03	0,185	0,1	145,05%	Telah tercapai	Kolaborasi antar pemangku kepentingan	
1.1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Percent	0,5	0	0,75	0	200,00%	Telah tercapai	Kolaborasi antar pemangku kepentingan	
1.1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Laj)	Persentase kendaraan bermotor wajib uji	Percent	71,8	73,58	71,50	20,14	28,05%	Akan tercapai	Sesuai dengan target kinerja	
		Calupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	Percent	11,98	10,76	11	10,76	97,82%	Akan tercapai	Komitmen kepala dinas dalam mewujudkan kinerja	
1.2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Percent	17,5	16,9	18,00	21,79	78,94%	Akan tercapai	Kolaborasi antar pemangku kepentingan	
1.2.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Laj)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	Percent	86	84,3	85	21,25	25,00%	Akan tercapai		
1.2.2	Program Pengekspansian Perkeretaapian	Persentase kinerja belanja perkeretaapian	Percent	100	100	100	0	0,00%	Akan tercapai	Komitmen kepala dinas dalam mewujudkan kinerja	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Responsif	Predikat SAKP	Predikat	A	75,86	77	0	-	-		
2.1	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public	Nilai SAKP	Percent	79	75,86	77	0	-	-		
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100	100	100	19,37	19,37%	Akan tercapai	Komitmen kepala dinas dalam mewujudkan kinerja	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan program yang telah ditentukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
2.15.05.2.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.15.05.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara lengkap target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat diurai sebagai berikut :

3.2. Matrik Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

3.3.1. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana

Sebagaimana uraian di atas bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV, jumlah program yang diusulkan sebanyak 3 program, 19 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran/ pagu indikatif pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan rutin kesekretariatan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 10.825.929.314,00.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan serta peningkatan pengelolaan dan keselamatan angkutan jalan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp. 41.960.914.226,00.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar Rp. 634.598.360,00.

3.3.2. Prioritas Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan

Sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mempunyai target kinerja sebanyak 3 program, 19 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. **53.421.441.900** (Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Triwulan IV sebagaimana tabel pada lampiran Rencana Kerja (Renja)

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025
Triwulan IV.

3.3.3. Target Kinerja

Berdasarkan pada capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I. Tidak ada perubahan target kinerja pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2 Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				PROVINSI	DAERAH	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					Bertambah / Berkurang
1	2	Dinas Perhubungan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						50.101.860.575,00	53.421.441.900,00	3.319.581.325,00				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	10.901.112.724,00	10.825.929.314,00	(75.183.410,00)				
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	119.866.800,00	131.173.174,00	11.306.374,00				
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	80.000.000,00	88.373.874,00	8.373.874,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah, yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)				PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SEBESAR	APBD 2025	RPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	39.866.800,00	42.799.300,00	2.932.500,00	10	11	12	13	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	7.255.919.700,00	7.224.800.200,00	(31.119.500,00)				
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	48	6.924.598.000,00	6.924.598.000,00		Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana	
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	311.321.700,00	287.147.200,00	(24.174.500,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	20.000.000,00	13.055.000,00	9 (6.945.000,00)	10 Kab. Sukoharjo	11 Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	13 Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	450.400.000,00	328.640.000,00	(131.760.000,00)				
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160	160	460.400.000,00	328.640.000,00	(131.760.000,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	700.360.000,00	748.064.500,00	47.704.500,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	26.400.000,00	26.400.000,00	9	10	11	12	13
									Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	166.125.000,00	266.894.000,00	100.769.000,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	40.000.000,00	39.950.000,00	(50.000,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76	76	248.775.000,00	246.137.500,00	(2.637.500,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)				PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SEBUDAH	APBD 2025	REKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											merata dan berkualitas	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	80.000.000,00	80.000.000,00		Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	2	5.500.000,00	5.500.000,00		Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	133.560.000,00	83.183.000,00	(50.377.000,00)	10 Kab. Sukoharjo	11 Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	13 Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	40.000.000,00	44.991.500,00	4.991.500,00				
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	30	40.000.000,00	44.991.500,00	4.991.500,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	973.384.224,00	2.348.259.940,00	(28.145.784,00)				
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	10.000.000,00	10.000.000,00		Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	263.730.000,00	272.730.000,00	9.000.000,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	6.655.000,00	6.655.000,00		Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)				PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SEKADAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				12	12	692.999.224,00	655.853.440,00	(37.145.784,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan penguatan ketahanan bencana
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1.351.182.000,00		51.839.500,00				
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36 Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi	36	36	882.922.000,00	882.922.000,00		Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan penguatan ketahanan bencana
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	4	419.900.000,00	462.239.500,00	42.339.500,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan penguatan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	20	20	48.360.000,00	57.860.000,00	9.500.000,00	10	11	12	13
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan penguatan ketahanan bencana
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	71,20	71,20	38.587.962.651,00	41.960.914.226,00	3.372.951.575,00				
			Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	11,00	11,00							
			Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	84	84							
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100	100	213.892.000,00	213.892.000,00	0,00				
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5	5	213.892.000,00	213.892.000,00		Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan penguatan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)				PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	100	34.150.176.551,00	37.645.152.801,00	3.494.976.250,00				
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	50	50	150.000.000,00	150.000.000,00		Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.512	3.512	33.163.522.551,00	36.566.970.101,00	3.403.447.550,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Tersejahtera dan Terpelihara	1.411	1.411	588.654.000,00	595.004.000,00	36.350.000,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)				PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekangan Jalan	Jumlah Pertiengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7.829	7.829	278.000.000,00	333.178.700,00	55.178.700,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah, yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100	100	370.794.100,00	437.876.050,00	67.081.950,00				
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	9	9	30.060.000,00	120.048.750,00	89.988.750,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah, yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	7	7	340.734.100,00	317.827.300,00	(22.906.800,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah, yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2.15.02.2.04	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100	100	249.476.000,00	220.690.200,00	(28.785.800,00)				
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	249.476.000,00	220.690.200,00	(28.785.800,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana
	2.15.02.2.05		Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	100	757.352.000,00	717.982.050,00	(39.369.950,00)				
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	2	30.000.000,00	29.170.500,00	(829.500,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)				PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Bermotor yang Terpelihara	9	9	687.352.000,00	650.133.800,00	10	11	12	13	
							(37.218.200,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	1	20.000.000,00	19.253.750,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	2	20.000.000,00	19.424.000,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	100	1.096.000.000,00	1.086.277.500,00					
							(9.722.500,00)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Jumlah: Perencanaan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaaan dan Pemasangan	3 3	6 3	7 1.046.000.000,00	8 1.046.000.000,00	9 9	10 Kab. Sukoharjo	11 Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	13 Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana
		2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perencanaan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 6	6 6	7 50.000.000,00	8 40.277.500,00	9 (9.722.500,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana
	2.15.02.2.07	2.15.02.2.07.0006 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100 100	100 100	7 94.425.800,00	8 143.975.800,00	9 49.550.000,00				
		2.15.02.2.07.0006 Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	11 11	11 11	7 94.425.800,00	8 143.975.800,00	9 49.550.000,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2.15.02.2.08	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100	100	1.320.966.000,00	1.204.827.025,00	(116.138.975,00)				
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuh Penerimaan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuh Penerimaan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	12	12	563.571.800,00	488.602.525,00	(74.969.275,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan penguatan ketahanan bencana
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12	12	757.394.200,00	716.224.500,00	(41.169.700,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan penguatan ketahanan bencana
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	247.600.000,00	221.868.250,00	(25.731.750,00)				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025			PAGU INDIKATIF (Rp)				PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	6	7	8	9				
1	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	33	33	30.000.000,00	21.399.000,00	(8.601.000,00)	10	11	12	13
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5	5	217.600.000,00	200.469.250,00	(17.130.750,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	30.000.000,00	29.451.000,00	(549.000,00)				
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	5	30.000.000,00	29.451.000,00	(549.000,00)	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SEUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2.15.02.2.14	Penyediaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	100	57.280.200,00	38.921.550,00	10	11	12	13	
		Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	100	57.280.200,00	38.921.550,00	10	11	12	13	
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	29.880.200,00	12.951.550,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana	
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	12	12	27.400.000,00	25.970.000,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana	
3	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	100	100	612.785.200,00	634.598.360,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PROVINSI	DAERAH
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah / Berkurang				
1	2 2.15.05.2.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 100	6 100	7 612.785.200,00	8 634.598.360,00	9 21.813.160,00	10	11	12	13
	2.15.05.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	7	7	612.785.200,00	634.598.360,00	21.813.160,00	Kab. Sukoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan dan penguatan ketahanan bencana

Tabel 3.3 Perubahan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian	Target Perubahan Renja 2025
						Target	Realisasi sd Trw I			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(5)* 100%	(10)	(11)
Dinas Perhubungan										
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	angka	0,29	0,03	0,185	0,1	145,95%	Telah Tercapai	-
1.1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	%	0,5	0	0,75	0	200,00%	Telah Tercapai	-
1.2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	%	24	16,9	18	21,79	78,94%	Akan Tercapai	-
1.3	Meningkatnya kualitas aparaturn dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	79	75,86	77	0	0,00%	Akan Tercapai	-

Kode	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian Renstra s.d. Tahun 2025 (%)	Status Capaian	Target Perubahan Renja 2025
						Target	Realisasi sd Trw I			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)* 100%	(10)	(11)
Dinas Perhubungan										
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	%	71,80	73,58	71,80	20,14	28,05%	Akan tercapai	-
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	%	11,98	10,76	11,49	10,76	93,65%	Akan tercapai	-
2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-
2.15.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	Akan tercapai	-
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	%	86,00	84,30	85,00	21,25	25,00%	Akan tercapai	-
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	19,37	19,37%	Akan tercapai	-

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Juni 2025 Triwulan I (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I tahun 2025, masih diperlukan upaya-upaya untuk pencapaian kinerja pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang

berwenang di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar **Rp. 3.319.581.325,-** atau **6,62%** dari anggaran semula murni **Rp. 50.101.860.575,-** menjadi anggaran perubahan **Rp. 53.421.441.900,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2025 sehingga diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo.